

STRATEGI METODE BINTER SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN UNTUK MENGATASI TERORISME DI WILAYAH KODIM 0735/SURAKARTA

STRATEGY TERRITORIAL DEVELOPMENT'S METHOD BY REGIONAL COMMAND UNIT TO COUNTER-TERRORISM IN REGION DISTRICT MILITARY COMMAND 0735 / SURAKARTA

Educ Permadi Eko P B¹, Pujo Widodo², Anton Imam Santosa³

Program Studi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

(educpermadi@gmail.com, pujowidodo@gmail.com,

antsantosa@yahoo.com)

Abstrak--Kodim 0735/Surakarta melaksanakan Pembinaan Teritorial di wilayahnya dengan metode Komunikasi Sosial, Pembinaan Perlawanan Wilayah dan Bakti TNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh strategi metode Pembinaan Teritorial Satkowil untuk mengatasi terorisme di wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Sumber data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta didukung studi dokumentasi dan triangulasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di wilayah Kodim 0735/Ska, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa strategi Pembinaan Teritorial Kodim 0735/Ska melalui metode Pembinaan Perlawanan Wilayah, Komunikasi Sosial dan Bakti TNI dapat berpengaruh terhadap upaya mengatasi terorisme di daerah. Kegiatan berupa pembangunan fisik dan non fisik ditujukan untuk membantu kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan strategi tersebut maka dapat merebut hati rakyat dan terciptanya kemandirian TNI - Rakyat. Sekaligus sebagai deradikalisasi, temu dini dan pencegahan terhadap kelompok-kelompok radikal yang dapat mengarah pada tindak terorisme di daerah. Di wilayah Surakarta terdapat kelompok Radikal Kanan, Radikal Kiri dan Radikal Lainnya yaitu banyaknya mantan teroris, kelompok PKI Gaya baru dan pendukung separatisme OPM yang dapat berpotensi menimbulkan konflik dan terorisme. Penanggulangan terorisme harus dilakukan secara bersama-sama institusi lain dan Pemerintah Daerah serta unsur masyarakat agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Strategi, Binter, Satkowil, Terorisme

Abstract--District Military Command 0735 / Surakarta implement Territorial Development in the region by fostering method Social Communication, National Security, and Bakti TNI. This study aims to analyze how to influence the strategy of the method of Territorial Development of counter-terrorism in the area. This study is a qualitative social research. Sources of data used included primary data and secondary data. The technique of collecting data using interviews, observation, and supported by documentary studies and triangulation. Qualitative data analysis conducted with

¹Alumni Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan.

²Sesprodi Doktoral Prodi Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

³Kabag Kerjasama Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertahanan.

data reduction, data presentation and conclusion. The study was conducted in the District Military Command 0735 / Ska. Based on this study showed that the strategy of the Territorial Development District Military Command 0735 / Ska through coaching methods Regional Resilience, Social Communication and Bakti TNI can affect the handling of terrorism in the region. Activities such as construction of the physical and non-physical is intended to petrify the difficulties of society and welfare. With these strategy, it can win the hearts of the people and the creation of oneness TNI - People. As well as a de-radicalization, gathering early and prevention of radical groups which can lead to acts of terrorism in the area. In the Surakarta's region there are groups of Radical Right, Left Radicals and Radical Another. The number of former terrorists, a group of PKI Gaya Baru and OPM that can potentially lead to conflict and terrorism. Counter-terrorism must be conducted jointly other institutions and local governments and community elements in order to obtain maximum results.

Keywords: Strategy, Territorial Development, Region Command Unit, Terrorism

Pendahuluan

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingan-kepentingannya agar tetap terlindungi. Fakta yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini mengalami dilema keamanan dan dilema pertahanan. Persoalan yang mengemuka yaitu siapa yang harus bertanggung jawab untuk menjawab dan menghadapi ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal. Padahal dimensi ancaman yang dihadapi saat ini dengan globalisasi yang ditandai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi menjadi semakin kompleks. Berdasarkan analisa strategis dan

identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan prediksi dan prioritasnya dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata⁴. Ancaman nyata yang menjadi prioritas dalam penanganannya diantaranya adalah terorisme dan radikalisme¹.

Strategi pertahanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Namun kenyataan saat ini, Sishankamrata diaktualisasikan dalam bentuk gabungan kapabilitas dan bukan kerja sama. Masalah dalam mewujudkan gabungan tidaklah mudah karena adanya ego sektoral yang kuat, sebagai contoh

⁴Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015). Buku Putih Pertahanan Negara. , Hal. 22.

dalam revisi UU anti terorisme⁵. Demikian juga dengan belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Keamanan Nasional⁶ menyebabkan struktur organisasi dalam Pertahanan Negara menjadi tumpang tindih. Perdebatan muncul tentang definisi Keamanan Nasional (*National security*), yang berkaitan erat dengan institusi manakah yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan Nasional.

Satuan Komando kewilayahan adalah seluruh satuan jajaran TNI AD yang sudah tergelar di seluruh wilayah dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Namun kenyataan yang terjadi, Satuan Komando Kewilayahan belum optimal dalam memberdayakan wilayah pertahanan di Darat. Permasalahan yang umum terjadi dalam pelaksanaan tugas Satuan Komando Kewilayahan yaitu kurangnya kerja sama dan koordinasi antara Satuan Komando Kewilayahan dengan aparat pemerintah. Struktur organisasi Satuan Komando Kewilayahan ditinjau dari tugas pokoknya sudah memadai namun apabila ditinjau dari perkembangan globalisasi yang ada saat

ini perlu pembenahan dan penyesuaian. Dari segi sarana dan prasarana, Satuan Komando Kewilayahan pada umumnya terpenuhi 60% TOP/DSPP apabila dibandingkan dengan tuntutan tugas yang dihadapi, luasnya daerah tanggung jawab serta yang paling dirasakan yaitu sarana transportasi, komunikasi dan akomodasi.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI mempunyai tugas yang telah diatur lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan pola OMP dan OMSP diantaranya untuk mengatasi terorisme. Namun sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang bersifat operasional sehingga menjadi hambatan dalam implementasinya, terlebih lagi apabila dihadapkan dengan Perundang-undangan yang lain terutama Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Terkait hal tersebut, salah satu permasalahan yang mengemuka yaitu adanya perbedaan persepsi dalam mengatasi terorisme antara TNI dan Polri.

Pemberantasan terorisme sampai dengan saat ini dilaksanakan oleh Polri dengan mengedepankan hukum karena

⁵Usman Hadi (2018, 14 Mei), Pengamat UGM : Ada Ego Sektoral dalam Revisi UU Antiterorisme, Sleman: Detik.com.

⁶Dewanto Samodro (2017, 20 Februari), Indonesia satu satunya negara Tanpa UU Keamanan Nasional, Jakarta : Antaraneews.com.

terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Polri tidak maksimal. Terorisme merupakan ancaman terhadap perdamaian dan Keamanan Nasional dan Internasional⁷, oleh karena itu penanganan terhadap terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergitas seluruh “*stake holder*” terkait dalam penanganan terorisme, yaitu Badan Intelijen Negara, Polri, TNI, Kemendagri dan BNPT dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kodim 0735/Surakarta merupakan Satuan Komando Kewilayahan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teritorial diantaranya untuk mengatasi terorisme. Terorisme merupakan ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat “meledak” di Kota Surakarta, dikaitkan dengan sejarah panjang dinamika radikalisme dan kelompok radikal di Kota Surakarta dengan rentetan aksi-aksinya. Bahkan populasi organisasi massa (ormas) Islam radikal di Jawa Tengah dan Yogyakarta diantaranya Surakarta kemungkinan adalah yang tertinggi di Indonesia⁸. Transformasi dari

gerakan radikal lokal inilah yang berpotensi mempunyai relasi dengan gerakan teroris. Di sisi lain Kodim 0735/Ska juga melaksanakan tugas tugas protokoler yang cukup tinggi intensitasnya selain tugas pembinaan teritorial. Tugas protokoler sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska untuk mengatasi terorisme. Kondisi ini tidak terlepas dengan jumlah personel Kodim 0735/Ska yang secara kuantitas belum sesuai dengan TOP/DSPP karena masih kekurangan personel. Dengan demikian terjadi ketidak seimbangan antara beban tugas dihadapkan pada jumlah personel.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik meneliti tentang strategi pembinaan teritorial Satuan Komando Kewilayahan untuk mengatasi terorisme di wilayah Kodim 0735/Surakarta. Tugas untuk menga-tasi terorisme adalah salah satu tugas TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang merupakan bagian dari tugas pokok TNI secara umum. Tugas untuk mengatasi terorisme diantaranya dilaksanakan oleh Satuan

⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁸ Setara, 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta*, Pustaka Masyarakat Setara. Jakarta. Hal. 69.

Komando Kewilayahan untuk itu diperlukan strategi pembinaan teritorial yang tepat untuk diterapkan oleh Kodim sebagai pelaksana di lapangan. Adanya fenomena bahwa diperlukan strategi pembinaan teritorial untuk mengatasi terorisme di wilayah Kodim 0735/Ska dihadapkan dengan kemungkinan ancaman terorisme yang sangat potensial di wilayah Kota Surakarta.

Untuk dapat menjelaskan fokus penelitian, maka ada beberapa hal yang akan dibahas dan menjadi rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah metode Binter Satkowil untuk mengatasi terorisme di wilayah kerja Kodim 0735/Ska; (2) Bagaimanakah kondisi wilayah kerja Kodim 0735/Ska; dan (3) Bagaimanakah strategi pembinaan teritorial Kodim 0735/Ska untuk mengatasi terorisme di wilayah Kodim 0735/Ska.

Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian strategi metode Binter Kodim 0735/Ska untuk mengatasi terorisme di wilayah ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang menawarkan desain penelitian yang bertujuan eksploratif.

Melalui metode ini, peneliti melakukan suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian sehingga instrumen penelitian adalah orang atau peneliti itu sendiri.

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Surakarta, Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena di Surakarta banyak terdapat kasus terorisme. Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang masuk zona merah radikalisme dan terorisme yang perlu mendapat perhatian khusus. Dari beberapa kasus terorisme yang terjadi, baik pelaku maupun korban berasal dari Surakarta. Begitu juga dengan organisasi yang disinyalir menganut paham radikal yang dapat mengarah pada aksi terorisme, berkembang di Surakarta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori Strategi

Dalam sejarahnya istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategos*⁹ atau *Strategeus*. Dalam perkembangannya, istilah strategi juga dikenal berasal dari kata *Strategia* yang memiliki arti “ahli militer”. *Strategos* dalam bahasa Yunani

⁹ Sedarmayanti, Manajemen Strategi, Bandung, Refika Aditama, 2014, Halaman 2.

diartikan sebagai Jenderal. Sedangkan perang adalah pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya). Dalam hal ini, strategi adalah kiat memimpin bala tentara.

Dalam memformulasikan strategi perlu diketahui terlebih dahulu tujuan (*ends*), konsep (*ways*), instrumen (*means*) dari organisasi itu sendiri. Strategi harus dikendalikan oleh tujuan (*Ends*) dan bukan oleh sumber daya (*Means*) untuk menjamin peluang yang maksimal dalam mencapainya. Karenanya, Tujuan (*Ends*) dan Konsep Strategis (*Ways*) menentukan kebutuhan Sumberdaya (*Means*). Namun demikian tetap Tujuan (*Ends*) dan Konsep Strategis (*Ways*) dipengaruhi oleh ketersediaan Sumber daya (*Means*). Apabila sumber daya gagal dipenuhi maka akan terjadi *Strategy-capabilities mismatch*. Dapat dicermati bahwa dalam mengambil keputusan tentang strategi, pengetahuan akan kemampuan pasukan sendiri akan sangat membantu.

Teori tentang Strategi yang ditulis oleh Carl Von Clausewitz yang mendalami strategi perang yang dipakai oleh

Napoleon Bonaparte dalam pertempuran dan pengalaman perangnya, memandang beberapa hal terkait elemen perang *Means, Way* dan *Ends*, sebagai berikut:

1. Menekankan perlunya mengkoncentrasikan kekuatan (*Means*) pada “titik menentukan” dari pertempuran.¹⁰
2. Nilai Pendadakan atau keterkejutan dalam *Ways* (strategi) terhadap musuh.¹¹
3. Penggunaan *Means* (Sumber daya) yaitu kekuatan secara besar besaran dan agresif.¹²

Teori tentang Strategi terutama dalam implementasinya dengan menggunakan pendekatan Kontingensi dari hasil penelitian Burn dan Stalker (1961) dan Lawrence dan Lorsch (1967) menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi strategi tidak dicapai oleh faktor tunggal sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. Kesuksesan implementasi strategi merupakan kontribusi berbagai faktor dan variabel tertentu dari dalam dan luar lingkungan organisasi.

¹⁰ Makmur Supriyatno. *Tentang Perang Bagian I Terjemahan “On War” Carl Von Clausewitz*. Jakarta, Makmur Cahaya Ilmu, 2017. Hal 270.

¹¹ Makmur Supriyatno. *Tentang Perang Bagian I Terjemahan “On War” Carl Von Clausewitz*. Jakarta, Makmur Cahaya Ilmu, 2017. Hal 260.

¹² Ibid. Hal 253.

2. Efektifitas implementasi strategi bergantung pada berbagai faktor berinteraksi dalam situasi tertentu.
3. Implementasi strategi menjadi efektif bila tingkat kesepakatan strategi tinggi, derajat kapasitas dan koordinasi dalam sistem implementasi inti, dan ada kesesuaian stabilitas dan kompleksitas lingkungan organisasi.¹³

Sintesis dari beberapa teori tentang strategi di atas untuk menguji apakah strategi yang dipilih efektif atau tidak dapat digunakan cara melihat sebagai berikut:

1. Apakah strategi tersebut dapat dikerjakan dengan instrumen sumber daya yang tersedia saat ini. (*Means*)
2. Kemudian perlu diyakinkan bahwa strategi tersebut dapat diterima oleh semua kalangan yang terlibat termasuk juga tentang pembiayaannya serta konsep operasional untuk mencapai tujuan. (*Ways*)
3. Yang terakhir perlu dikaji tentang kemampuan dari strategi tersebut dalam mencapai tujuan (*Ends*).

Konsep Terorisme

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, daripada hanya pada jatuhnya korban.

Definisi tentang Terorisme cukup beragam. Amerika Serikat menuangkan pengertian terorisme secara resmi melalui undang-undang negara, yang merupakan payung hukum untuk dijabarkan dalam berbagai strategi dan pola-pola operasional masing-masing dalam kegiatan antiterorisme. Terorisme didefinisikan dalam Kode Kriminal Federal (Chapter 113B of Part I of Title 18 of the United States Code, tentang terorisme dan daftar tindakan kriminal yang berhubungan dengan terorisme). Pada Section 2331 of Chapter 113b, terorisme didefinisikan sebagai:

“Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kekerasan...atau aksi-aksi yang mengancam kehidupan, yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kriminal Amerika Serikat atau negara manapun

¹³ Darwin Ahmad Pella . Problem Implementasi Strategi. Jakarta, Aida Infini Maksima, 2016. Hal 29.

*dan...yang terjadi karena keinginan untuk (i) menakut-nakuti atau memaksa penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi dan paksaan, atau (iii) memberikan dampak terhadap langkah suatu pemerintah dengan cara perusakan massal, pembunuhan atau penculikan; dan...terjadi pada mulanya di dalam yurisdiksi teritorial Amerika Serikat..atau...terjadi pada mulanya di luar yurisdiksi teritorial Amerika Serikat”.*¹⁴

Adapun definisi tindak pidana terorisme sesuai UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan

motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁵

Beberapa definisi terorisme di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme secara umum terkait dengan berbagai motif politik, yaitu hubungan antara individu, kelompok, masyarakat dengan negaranya dalam bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan ancaman kemanusiaan. Awalnya terorisme cenderung dilakukan oleh kekuasaan negara terhadap rakyatnya atau negara lain, tetapi saat ini terorisme lebih diarahkan pada pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan yang bersifat individu atau kelompok.¹⁶

Konsep Penanggulangan Terorisme

Model penanggulangan terorisme dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu yang bersifat represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan dengan melaksanakan pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum dengan menangkap, membawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara hingga hukuman

¹⁴ A.M. Hendropriyono. *Terorisme Fundamental* Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta, Kompas, 2009. Hlm.28,29.

¹⁵ UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 1

¹⁶ Djelantik, S., 2010, "Teroris Bukan Aktor Negara dalam Hubungan Internasional", dalam Andre Pareira (Ed) *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Parahyangan Center for Internasional Studies, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 26.

mati. Sedangkan pendekatan preventif dengan metode deradikalisasi atau pencegahan.

Terorisme digolongkan sebagai sebuah bentuk kejahatan yang terorganisir. Terorisme muncul bukan dari ruang hampa, melainkan memerlukan kultur tertentu untuk berkembang. Banyak faktor pendukung yang menyebabkan timbulnya terorisme, diantaranya ideologi dan teologi. Keduanya merupakan alasan bagi seseorang dalam melakukan tindakan radikal untuk kepentingan kelompoknya. Dalam sebuah aksi terorisme sangat memerlukan anggota yang direkrut melalui doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme.

Untuk mengatasi terorisme di Indonesia, strategi yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43 menyebutkan:

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama

*internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*¹⁷

Secara teknis strategi tersebut dijabarkan, melalui revisi yang tercantum dalam UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 43A menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.¹⁸

¹⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43.

¹⁸ UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 43A.

Konsep Satkowi

Doktrin TNI AD “ Kartika Eka Paksi “ menyebutkan bahwa salah satu fungsi utama TNI AD adalah Pembinaan Teritorial (Binter), yang diselenggarakan guna menunjang keberhasilan tugas pokok TNI AD, khususnya di dalam penerapan sistem pertahanan semesta. Penyiapan dan penyelenggaraan Sistem Pertahanan Semesta memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan segenap komponen bangsa, karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya wilayah telah terbagi habis oleh fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan.

Satuan Komando kewilayahan sebagai salah satu bentuk gelar kekuatan TNI AD dalam menyelenggarakan tugas Binter di daerah meningkatkan kemampuannya, sehingga penyelenggaraan Binter dapat dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya guna kepentingan pertahanan negara aspek darat dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD. Satuan Komando Kewilayahan (Kowil) terdiri dari Kodam, Korem, Kodim dan Koramil yang

merupakan subyek utama bagi keberhasilan Binter.¹⁹

Konsep Binter

Untuk mengimplementasikan konsepsi tersebut agar mencapai sasaran yang telah ditentukan, digunakan Metoda Binter sebagai berikut:²⁰

1. Komunikasi Sosial, yaitu memelihara dan meningkatkan keeratn hubungan dengan seluruh komponen bangsa sehingga akan terwujud saling pengertian dan kebersamaan mendalam yang memungkinkan timbulnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan negara di darat.
2. Pembinaan Perlawanan Wilayah, yaitu pembinaan masyarakat yang mengutamakan pendekatan untuk mewujudkan stabilitas ketahanan wilayah serta meningkatkan kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan dalam menanggulangi gangguan dan ancaman yang mungkin timbul. Dilakukan dengan memberikan saran dan dorongan terhadap instansi fungsional dalam rangka mewujudkan ketahanan yang dinamis disuatu

¹⁹ Mabesad, 2004, Buku Petunjuk Operasi tentang Binter. Hlm. 4.

²⁰ Ibid. Hlm. 7.

wilayah guna menangkal setiap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bakti TNI AD, yaitu pelibatan dan pendayagunaan kemampuan TNI sebagai kekuatan pertahanan dalam menjalankan Binter untuk menunjang pertahanan negara tanpa mengabaikan program pembangunan nasional dengan pendekatan kesejahteraan atau lebih mengutamakan meningkatkan pembangunan masyarakat yang mengandung aspek pertahanan dengan kegiatan antara lain:

- a. Membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (*civic mission*).
- b. Menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapan satuan.

Binter harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam rangka mendukung operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai UU

RI No 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7. Satuan Komando Kewilayahan menye-lenggarakan Binter pada operasi mengatasi terorisme dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :²¹

1. Menginventarisir dan memvalidasi data Ter secara terus menerus serta membina daerah yang memungkinkan berkembangnya organisasi teroris di wilayah.
2. Melakukan pembinaan terhadap mitra karib untuk digunakan sebagai jaring informasi di wilayah melalui kegiatan penyuluhan atau penerangan tentang temu cepat lapor cepat terhadap aksi terorisme.
3. Melakukan penyuluhan kepada komponen masyarakat tentang peningkatan kepekaan masyarakat terhadap provokasi terorisme.
4. Membina komponen masyarakat melalui kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran bela negara, kesatuan dan persatuan serta semangat cinta tanah air untuk melakukan perlawanan terhadap aksi teroris.

²¹ Mabasad, 2011, *Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial*. Hlm. 36,37.

5. Mengaktifkan sistem temu cepat dan lapor cepat di lingkungan masyarakat tentang tempat, organisasi dan kegiatan teroris di wilayah.
6. Memberdayakan pemerintah daerah dan instansi terkait secara terpadu disemua lini guna menertibkan administrasi kependudukan dan barang dalam rangka pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang dicurigai dan masuk melalui bandara, pelabuhan, dan wilayah perbatasan.
7. Membina dan memberdayakan instansi terkait daerah dalam pengawasan terhadap pedagang yang menyediakan bahan kimia, bahan dasar peledak yang terkait dengan proses pembuatan bahan peledak.
8. Memberdayakan Kominda dalam rangka meningkatkan kegiatan deteksi dan cegah dini terhadap orang dan kegiatan organisasi yang terkait dengan terorisme.
9. Membina daerah terpencil dan terisolir melalui kegiatan pembinaan perlawanan wilayah, komunikasi sosial dan Bakti TNI dengan sasaran pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik dalam rangka

meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh dari kegiatan organisasi terorisme di wilayah.

Metode Binter Kodim 0735/Ska

Kodim 0735/Ska menyelenggarakan kegiatan Binter (Pembinaan Teritorial) dengan menggunakan metode Binter, yaitu: Komunikasi Sosial , Pembinaan Perlawanan Wilayah, dan Bakti TNI. Kegiatan Binter diproyeksikan dalam rangka membantu Pemerintah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat dan untuk memberdayakan wilayah pertahanan di darat dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta untuk mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat diantaranya untuk mengatasi terorisme.

1. Metode Komunikasi Sosial (Komsos)

Komsos dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska untuk memelihara dan meningkatkan keeratn hubungan guna mewujudkan saling pengertian dan kebersamaan dengan komponen bangsa dalam rangka penyiapan pertahanan negara secara dini, membantu kesulitan rakyat dan mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD diantaranya untuk mengatasi

terorisme. Dalam penyelenggaraan Komsos yang dilakukan oleh Kodim 0735/Ska dengan menggunakan bentuk-bentuk ceramah dan dialog. Kegiatan dengan metoda Komsos sesuai program yang telah dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska beserta jajaran Koramil meliputi Komsos dengan Komponen Masyarakat, Komsos dengan aparat pemerintah dan Komsos dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

Dalam Peraturan Kasad disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan Komsos untuk mengatasi aksi terorisme meliputi:

- a. Memberikan secara langsung penyuluhan/ceramah dan penerangan terhadap komponen bangsa agar tidak terpengaruh oleh provokasi, agitasi dan propaganda gerakan aksi terorisme, sedangkan secara tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.
- b. Memberikan penyuluhan/ ceramah dan penerangan terhadap komponen bangsa agar mengaktifkan dan melaksanakan temu cepat dan lapor cepat tentang keberadaan dan kegiatan aksi terorisme.
- c. Memberikan penyuluhan/ ceramah dan penerangan terhadap

komponen bangsa tentang pemberdayaan pemerintah daerah dan instansi terkait secara terpadu untuk menghancurkan kekuatan dan alat peralatan aksi terorisme.

- d. Memberikan penyuluhan/ ceramah dan penerangan terhadap komponen bangsa tentang pemberdayaan pemerintah daerah dan instansi terkait secara terpadu di semua lini untuk meningkatkan ketanggapsegeraan terhadap administrasi penduduk, lalu lintas orang maupun barang yang dicurigai melalui bandara, pelabuhan dan wilayah perbatasan.
- e. Memberikan penyuluhan/ ceramah dan penerangan terhadap komponen bangsa tentang pembinaan dan pemberdayaan instansi terkait daerah dalam pengawasan terhadap pedagang yang menyediakan zat kimia, bahan dasar peledak yang terkait dengan proses pembuatan bahan peledak.
- f. Memberikan penyuluhan/ ceramah dan penerangan terhadap komponen bangsa tentang pembinaan daerah terpencil dan terisolir melalui kegiatan pembinaan perlawanan wilayah, Komsos, dan Bakti TNI dengan sasaran

pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh dari kegiatan organisasi terorisme di wilayah.

g. Memberikan penyuluhan/ ceramah dan penerangan terhadap komponen bangsa tentang peningkatan kerja sama dengan instansi terkait untuk menghancurkan hubungan komunikasi antara terorisme dalam negeri dan luar negeri.²²

2. Metode Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil)

Kodim 0735/Ska melaksanakan metoda Binwanwil untuk mengatasi terorisme di wilayahnya. Diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan potensi wilayah pertahanan untuk meningkatkan daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman dengan menumbuhkan kesadaran bela negara dan penyiapan potensi pertahanan di daratan dengan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka ketersediaan logistik wilayah

pertahanan, pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Dalam penyelenggaraan pembinaan perlawanan wilayah yang dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska dengan segenap komponen bangsa menggunakan teknik langsung dan tidak langsung. Teknik langsung berarti Kodim 0735/Ska bersama komponen bangsa, melaksanakan program Binwanwil yang telah disepakati bersama secara langsung. Sedangkan teknik tidak langsung yaitu menyampaikan ide, saran kepada komponen bangsa yang berhubungan dengan upaya Binwanwil.

Dalam Peraturan Kasad disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan Binwanwil untuk mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari pelaksanaan Binwanwil dalam OMSP yang juga dilaksanakan untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata dan pemberontakan bersenjata meliputi:

a. Mengajak komponen bangsa untuk saling memberikan informasi dan penerangan terhadap masyarakat agar tidak terpengaruh oleh

²² Peraturan Kasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang

Buku Petunjuk Teknik Komunikasi Sosial, Hlm. 26-27.

- provokasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata dan aksi terorisme.
- b. Mengajak komponen bangsa untuk mengaktifkan temu cepat dan lapor cepat terhadap keberadaan, organisasi dan kegiatan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata dan aksi terorisme.
 - c. Memberikan ADO dan data teritorial lainnya untuk mendukung satuan yang akan melaksanakan operasi di wilayah.
 - d. Mengajak komponen bangsa untuk menyiapkan dan mengoordinasikan penggunaan kompartemen wilayah sesuai dengan klasifikasi daerah.
 - e. Mengajak komponen bangsa untuk mengorganisir masyarakat melalui kegiatan PLS (Pendidikan Latihan Kesiapsiagaan), PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara) dan Pramuka guna meningkatkan kesadaran bela negara (cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara) dan wawasan kebangsaan (memiliki rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan) dalam rangka membangun perlawanan wilayah guna memisahkan dan memutuskan hubungan antara masyarakat dengan gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata dan aksi terorisme.
 - f. Mengajak komponen bangsa untuk kerja sama guna menghancurkan hubungan komunikasi antara gerakan separatis, pemberontakan bersenjata dan aksi terorisme dalam negeri dengan luar negeri.
 - g. Mengajak komponen bangsa menyiapkan dan mengerahkan logistik wilayah untuk mendukung satuan yang melaksanakan operasi.
 - h. Mengajak komponen bangsa untuk mewujudkan stabilitas kondisi dinamis masyarakat yang meliputi aspek Ipoleksosbudhankam untuk mencegah pengaruh separatis, pemberontakan bersenjata dan aksi terorisme terhadap masyarakat.
 - i. Mengajak komponen bangsa untuk membatasi ruang gerak dengan dengan cara mengisolasi daerah yang digunakan gerakan separatis

bersenjata, pemberontakan bersenjata dan aksi terorisme.²³

3. Metode Bakti TNI

Bakti TNI dilaksanakan Kodim 0735/Ska dengan melakukan TMMD dan Karya Bakti. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menangani masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait atau atas inisiatif sendiri yang terkoordinasikan dalam rangka pertahanan negara dan membantu kesulitan rakyat sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuknya berupa kegiatan fisik berupa jambanisasi, penghijauan lingkungan dan KB Kes maupun non fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Kegiatan TMMD Sengkuyung yang dilaksanakan selama Tahun 2018, meliputi kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik yang dilaksanakan, yaitu: pavingisasi jalan, perbaikan saluran, normalisasi saluran, pelebaran jembatan, pembangunan talud dan pembangunan jalan inspeksi saluran. Sedangkan Kegiatan Non Fisik, berupa: penyuluhan wawasan kebangsaan, kamtibmas, kesehatan, hukum,

perijinan, pertanahan, pajak dan pelayanan kependudukan serta Bazar, pasar murah dan bantuan sembako gratis kepada masyarakat tidak mampu.

Kodim 0735/Ska melaksanakan Bhakti TNI berupa penghijauan untuk membantu pemerintah daerah dalam peningkatan pelestarian lingkungan yang hijau terutama di lahan-lahan kosong, gundul dan tidak produktif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penghijauan dilaksanakan dengan metode kerja sama dan gotong royong dengan masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta di pinggir jalan Ring Road, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta dan Tanggul Sungai Bengawan Solo Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta pada 18 Mei 2018.

Deskripsi Kodim 0735/Ska

Kodim 0735/Ska sebagai Komando Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan teritorial

²³ Peraturan Kasad Nomor Perkasad/29-02/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012

tentang Buku Petunjuk Teknik Pembinaan Perlawanan Wilayah, Hlm. 26-27.

dalam rangka menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, serta menjaga keamanan di wilayahnya. Dalam gelar kekuatan Kodim 0735/Ska membawahi 5 Koramil, yaitu Koramil 01/Laweyan, Koramil 02/Banjarsari, Koramil 03/Serengan, Koramil 04/Jebres dan Koramil 05/ Pasar Kliwon. Koramil-Koramil tersebut tergelar disetiap wilayah Kecamatan yang berada di wilayah kota Surakarta.

Berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad 18/IV/2008 Tanggal 8 April 2008, organisasi Kodim 0735/Ska disusun dalam empat Eselon dan jabatan yaitu: Eselon Pimpinan, Komandan Komando Distrik Militer, disingkat Dandim. Eselon Pembantu Pimpinan, Kepala Staf Komando Distrik Militer, disingkat Kasdim. Perwira Seksi Intelijen, disingkat Pasiintel. Perwira Seksi Operasi, disingkat Pasiops. Perwira Seksi Administrasi, disingkat Pasimin. Perwira Seksi Teritorial, disingkat Pasiter. Perwira Seksi Logistik, disingkat Pasilog. Eselon Pelayanan, Kepala Kelompok Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Kapoktuud. Eselon Pelaksana, Komandan Rayon Militer, disingkat Danramil dan Komandan

Unit Intelijen Kodim, disingkat Danunit inteldim.

Wilayah Kodim 0735/Ska

Kodim 0735/Ska sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat melaksanakan tugas-tugas TNI AD yang dilakukan dengan pola OMP maupun OMSP dalam rangka menjalankan fungsi TNI AD sebagai penangkal, penindak dan pemulih. Memperhatikan tugas-tugasnya tersebut, Kodim 0735/Ska senantiasa memonitor kecenderungan perkembangan wilayah yang dinamis serta selalu menganalisa daerah dan aspek-aspek wilayah.

Surakarta mempunyai keterpengaruhannya terhadap kegiatan dan cara bertindak kelompok potensi radikal, kelompok radikal kiri dan radikal lainnya.

a. Kondisi Geografi

- 1) Letak wilayah Kodim 0735/Ska terletak antara $7^{\circ}33'17''5$ $110^{\circ}47'56''E$ dengan batas wilayah sebelah utara Kodim Karanganyar, sebelah Timur Kodim Sukoharjo, sebelah Barat Kodim Boyolali dan sebelah selatan Kodim Sukoharjo;
- 2) Luas wilayah dan pembagian wilayah. Luas wilayah Kota Surakarta sekitar 44.04 Km yang terdiri dari:

- a) Satu Kotamadya yang dijabat oleh Walikota;
- b) Lima Kecamatan dengan pimpinan adminis-tratif dijabat oleh Camat;
- c) 51 Kelurahan dengan pimpinan administratif dija-bat oleh Lurah;
- d) Satu Komando kewi-layahan yang dijabat oleh Dandim;
- e) Lima Komando Re-sort/Koramil dijabat oleh Danramil; dan
- f) 51 Kelurahan yang dibina oleh Babinsa.

b. Kondisi Demografi

Keadaan demografii dan tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Surakarta cukup besar sampai akhir tahun 2017 adalah 514.171 jiwa yang terdiri dari :

- 1) Jenis kelamin
 - a) Laki-laki= 249.978 jiwa; dan
 - b) Perempuan= 264.193 jiwa.
- 2) Kepadatan penduduk Kota Surakarta 12.000 KM²

Radikalisme dan Terorisme di Surakarta

Surakarta dipandang sebagai lahan subur bagi penyemaian paham radikal sejak tahun 1998 karena kelompok radikal di Surakarta terus membentuk hubungan-hubungan sosial sebagaimana dicatat oleh banyak media Internasional. Radikalisme

di Surakarta menjadi lebih bergaung setelah Bom Bali 12 Oktober 2001. Para pelaku Bom Bali dianggap memiliki keterlibatan dengan Ustad abubakar Ba'asyir yang memimpin Majelis Mujahidin Indonesia dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT).

Kota Surakarta dan sekitarnya sering diguncang ancaman hingga teror oleh kelompok terorisme. Kota Surakarta masuk sebagai daerah dengan status zona merah terorisme. Masuknya Surakarta sebagai daerah zona merah karena banyak pelaku dari aksi terorisme yang terjadi berasal dari Surakarta. Surakarta juga masuk dalam daerah yang rawan dengan adanya penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Perkembangan situasi Wilayah Kota Surakarta tahun 2018 tidak terlepas dari pengaruh situasi Ipoleksosbudhankam yang terus berkembang, seperti kegiatan kelompok potensi radikal, kegiatan politik serta aksi-aksi protes dari masyarakat maupun mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dipandang tidak memperhatikan rakyat kecil dan kepentingan politik oleh sebagian kelompok dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah.

Strategi Binter Kodim 0735/Ska

Strategi Kodim 0735/Ska untuk mengatasi terorisme mengedepankan pendekatan *soft approach* melalui tindakan preventif atau pencegahan. Kodim 0735/Ska mengupayakan agar kelompok dan paham radikal tidak dapat berkembang. Kegiatan Binter yang dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska di fokuskan untuk meredam akar dari paham dan kelompok radikal agar tidak tumbuh. Dalam hal ini kebijakan yang dilaksanakan dengan mengadakan komunikasi sosial secara intensif untuk mengadakan pendekatan tokoh kelompok radikal sehingga timbul rasa segan untuk melakukan aksi radikal. Kegiatan Binwanwil dilaksanakan dengan sasaran obyek yang dibina pada generasi muda khususnya pelajar SMA. Kegiatan lain yang dilaksanakan dengan memberdayakan fungsi Intelijen Kodim 0735/Ska untuk melaksanakan penggalangan.

Pembahasan

Pembinaan Teritorial dilaksanakan untuk memberdayakan wilayah pertahanan di darat dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Agar Pembinaan Teritorial berdaya guna dan berhasil guna maka

perlu dilaksanakan Strategi Pembinaan Teritorial. Strategi Pembinaan Teritorial dilaksanakan dengan metode Binter yaitu Pembinaan Perlawanan Wilayah, Komunikasi Sosial dan Bakti TNI. Metode-metode tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Binter yang memiliki sifat sebagai kegiatan terkoordinasikan, lintas sektoral, terkait dan terpadu²⁴ untuk kepentingan pertahanan negara sehingga berperan dalam penanggulangan terorisme secara nyata di lapangan. Pada data tentang metode Binter yang dilaksanakan Kodim 0735/Ska meliputi beberapa aspek yaitu SDM personel Kodim 0735/Ska, sarana dan prasarana, bentuk metode Binter serta kelebihan dan kelemahan yang akan diuraikan berdasarkan hasil wawancara, data dan dokumen pendukung serta pendapat para ahli.

Metode Binter Kodim 0735/Ska

Penelitian terhadap metode Binter dari hasil wawancara maupun dari dokumen dikaitkan dengan pelaksanaan metode binter yang diharapkan dihadapkan dengan penelitian terdahulu maupun pendapat para ahli.

²⁴ Mabasad'2011. Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial.

Komunikasi Sosial

Sesuai tugas pokoknya, Kodim 0735/Ska melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas dalam OMSP adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dengan sistem pertahanan semesta. Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode Binter saat ini oleh Satkowil telah dilaksanakan melalui kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam rangka ikut memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kodim 0735/Ska dalam menyelenggarakan Binter di antaranya melalui metode Komsos. Metode tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan kepada segenap komponen bangsa. Diharapkan terwujud kemanunggalan TNI-Rakyat dan meningkatnya partisipasi komponen bangsa di bidang pertahanan negara. Selain itu untuk memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa. Terwujudnya saling pengertian dan saling kebersamaan.

Kodim 0735/Ska melaksanakan Binter dengan metode Komsos untuk

memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan guna mewujudkan saling pengertian dan kebersamaan dengan komponen bangsa dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan persiapan pertahanan negara. Kegiatan dengan metoda Komsos sesuai program yang telah dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska beserta jajaran Koramil meliputi Komsos dengan Komponen Masyarakat, Komsos dengan aparat pemerintah dan Komsos dengan Keluarga Besar TNI (KBT). Penyelenggaraan kegiatan Komsos dalam rangka program tersebut menggunakan bentuk ceramah dan dialog.

Bentuk lain kegiatan Komsos yang dilaksanakan oleh personel Kodim 0735/Ska berupa melakukan kegiatan olah raga bersama, kegiatan ibadah dan ceramah keagamaan, silaturahmi, rapat dan menghadiri undangan masyarakat. Melalui komunikasi dan interaksi secara langsung dan terus menerus dengan masyarakat maka akan tercipta rasa kepercayaan dari masyarakat. Bertitik tolak dari kepercayaan yang didapatkan inilah, maka Personel Kodim 0735/Ska dapat lebih mudah mempengaruhi dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk kepentingan pertahanan negara, mengatasi kesulitan rakyat dan

mendukung tugas pokok TNI AD yang berkaitan dengan upaya untuk mengatasi terorisme di wilayah Kota Surakarta.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, Kodim 0735/Ska masih terdapat kekurangan personel. Hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan Komsos yang dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska. Demikian juga dengan adanya keterbatasan alat komunikasi berupa HT di masing-masing Koramil serta Sarana transportasi berupa sepeda motor. Keterbatasan alat komunikasi berpengaruh pada pelaksanaan pengendalian dari pimpinan Kodim 0735/Ska dalam pelaksanaan Komsos yang dilaksanakan oleh Babinsa maupun Danramil. Di sisi lain dengan belum terpenuhinya kendaraan sepeda motor, maka membatasi mobilitas Babinsa dalam melaksanakan kegiatan Komsos.

Pembinaan Perlawanan Wilayah

Kodim 0735/Ska dalam melaksanakan Pembinaan Ketahanan Wilayah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap ketahanan suatu wilayah. Dengan kondisi masyarakat yang semakin kompleks saat ini maka perlu untuk menumbuhkan kepedulian serta kesadaran terhadap bela negara. Meningkatkan ketahanan suatu wilayah

dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan Wilayah merupakan terbentuknya potensi kondisi sosial masyarakat yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan. Berupa semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang mendukung upaya pertahanan negara. Kesadaran masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi diperlukan guna mewujudkan dan terpenuhinya rasa aman dan tenteram di wilayahnya. Potensi kekuatan kewilayahan yang melibatkan aparat keamanan, aparat pemerintah dan masyarakat untuk menangkal, mencegah dan siap menghadapi kemungkinan ancaman terhadap wilayahnya. Selain itu juga terciptanya ketahanan wilayah dari kemungkinan gangguan dan ancaman yang berasal dari dalam maupun luar wilayah.

Kodim 0735/Ska melaksanakan metoda Binwanwil untuk mengatasi terorisme di wilayahnya. Diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan potensi wilayah pertahanan untuk meningkatkan daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman dengan menumbuhkan kesadaran bela negara dan penyiapan potensi pertahanan di daratan dengan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka ketersediaan

logistik wilayah pertahanan, pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Binwanwil yang diselenggarakan Kodim 0735/Ska melalui penanaman wawasan kebangsaan bagi komponen bangsa untuk penangkalan terhadap pengaruh provokasi aksi terorisme dilakukan dengan melakukan pembinaan, pembekalan dan sosialisasi terhadap pelajar sekolah mulai SD, SLTP dan SLTA. Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman tentang 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Memberikan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran dalam membela Negara Indonesia, menumbuhkan kebanggaan masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika, membentuk fisik dan mental serta kepribadian yang baik serta memiliki sifat kesetiakawanan sosial di seluruh kalangan masyarakat khususnya generasi muda dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif, membangun komponen masyarakat yang mandiri, peduli, bertanggung jawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat dan mewujudkan komponen masyarakat yang adil dan makmur dalam rangka stabilitas kondisi dinamis masyarakat

untuk mencegah pengaruh aksi terorisme terhadap masyarakat khususnya generasi muda.

Pelaksanaan metode Binwanwil Kodim 0735/Ska pada umumnya berjalan baik dan dapat berpengaruh terhadap upaya untuk mengatasi terorisme di wilayah Kota Surakarta. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya penangkalan terhadap pengaruh provokasi pengaruh dan aksi radikalisme maupun terorisme. Namun penyelenggaraan Binwanwil yang dilaksanakan masih belum optimal apabila dihadapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan baik dari dalam maupun dari luar.

Bakti TNI

Metode Bakti TNI dilaksanakan Kodim 0735/Ska dengan melakukan Karya Bakti. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menangani masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait atau atas inisiatif sendiri yang terkoordinasikan dalam rangka pertahanan negara dan membantu kesulitan rakyat sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuknya berupa kegiatan fisik berupa jambanisasi, penghijauan lingkungan dan KB Kes maupun non fisik berupa

penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Hasil dari pembangunan fisik berupa jambanisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pembuatan jambanisasi maka dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sedangkan kegiatan penanaman atau penghijauan di lingkungan dan lahan-lahan kosong untuk membantu program pemerintah dalam melaksanakan gerakan penghijauan dan kampanye Indonesia Hijau, Berseri, Bersih, Sehat, Rapi dan Indah sebagai upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Kegiatan KB Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan KB kepada masyarakat kota Surakarta sekaligus mendorong optimalisasi instansi kesehatan yang ada di wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait laju pertumbuhan penduduk.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan melalui Bakti TNI / TMMD tidak terlalu besar. Seperti pada proyek-proyek pekerjaan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum. Namun yang lebih utama dari tujuan TMMD adalah bagaimana dapat merebut hati rakyat dan dapat manunggalnya TNI - Rakyat. Seperti dalam pembangunan atau renovasi tempat

ibadah, pembangunan MCK / Jambanisasi dan pos Kamling. Semua sasaran fisik diarahkan untuk mengatasi kesulitan dan keterbatasan masyarakat. Hal ini dapat meringankan beban serta meningkatkan kesejahteraannya.

Lokasi TMMD dipilih daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan ataupun konflik. Apabila tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah maka akan mudah terprovokasi atau terhasut oleh faham-faham lain seperti radikalisme dan kontra terhadap pemerintah. Dengan melalui TMMD maka TNI dapat masuk ke daerah-daerah tersebut melakukan pemetaan, pengenalan dan pembinaan masyarakat. Kegiatan pembangunan dilaksanakan secara gotong-royong dengan masyarakat setempat. Anggota Kodim 0735/Ska dapat berinteraksi dan mengenal kondisi masyarakat setempat untuk dapat memberikan informasi dan keterangan tentang kondisi wilayah.

Kegiatan non-fisik bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemberian informasi-informasi. Sebagian besar masyarakat masih minim pendidikannya dan pengetahuannya yang diakibatkan terbatasnya akses informasi. Dengan pembekalan tersebut diharapkan masyarakat akan dapat meningkatkan kehidupannya dan memahami bentuk-

bentuk ancaman keamanan termasuk bahaya narkoba dan radikalisme.

Kondisi Wilayah Kodim 0735/Ska

Surakarta dari data-data yang ada merupakan wilayah dengan basis kelompok radikal yang cukup besar dengan potensi komunitas kelompok radikal yang cukup besar. Kota Surakarta masuk sebagai daerah dengan status zona merah terorisme. Masuknya Surakarta sebagai daerah zona merah karena banyak pelaku dari aksi terorisme yang terjadi berasal dari Surakarta. Surakarta juga masuk dalam daerah yang rawan dengan adanya penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Situasi Wilayah Kota Surakarta tahun 2018 tidak terlepas dari pengaruh situasi Ipoleksosbudhankam yang terus berkembang

Untuk mencegah radikalisme, Kodim 0735/Ska melaksanakan kegiatan deradikalisasi dengan materi mengenai bahaya terorisme, wawasan kebangsaan dan PBB. Motivasi para peserta deradikalisasi selama pelaksanaan kegiatan menunjukkan antusias dan semangat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat diterima dilingkungan masyarakat wilayah Kota Surakarta. Kegiatan

deradikalisasi berjalan sesuai rencana namun perlu ditingkatkan khususnya masalah koordinasi, sehingga akan lebih matang dalam pelaksanaan dan hasilnya lebih maksimal.

Strategi Binter Kodim 0735/Ska

Strategi Kodim 0735/Ska untuk mengatasi terorisme adalah dengan mengupayakan agar kelompok dan paham radikal tidak dapat berkembang. Kegiatan Binter yang dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska di fokuskan untuk meredam akar dari paham dan kelompok radikal agar tidak tumbuh. Dalam hal ini kebijakan yang dilaksanakan dengan mengadakan komunikasi sosial secara intensif untuk mengadakan pendekatan tokoh kelompok radikal sehingga timbul rasa segan untuk melakukan aksi radikal. Kegiatan Wanwil yang dilaksanakan masih terbatas dari sisi sasaran obyek yang dibina pada pelajar SMA. Kegiatan lain yang dilaksanakan dengan memberdayakan fungsi Intelijen Kodim 0735/Ska untuk melaksanakan penggalangan.

Kodim 0735/Ska memiliki tantangan yang cukup berat dalam melaksanakan tugas untuk mengatasi terorisme di wilayah Surakarta, mengingat Surakarta dari data-data yang ada merupakan wilayah dengan basis

kelompok radikal yang cukup besar. Dengan potensi komunitas kelompok radikal yang cukup besar, maka diperlukan strategi yang cermat di dalam meredam gerakan radikal yang sewaktu waktu dapat bertransformasi menjadi aksi terorisme. Oleh karena itu, strategi untuk mengisolasi dan mempengaruhi sumber radikalisme memang memiliki dampak positif dalam meredam dan menghambat penyebaran paham radikal dan munculnya aksi terorisme. Namun apabila dianalisa lebih mendalam, pendapat A.M. Hendropriyono terkait tanah atau bisa diartikan lingkungan sekitar perlu juga diperhatikan karena juga berdampak masif bagi penyebaran paham radikalisme. Sehingga strategi binter dalam mengatasi terorisme tidaklah cukup apabila hanya dilaksanakan secara parsial, namun diperlukan suatu upaya yang komprehensif dengan memanfaatkan semua sumber daya dan metode yang ada.

Kesimpulan

Kodim 0735/Ska adalah komando operasional dalam jajaran TNI AD dan merupakan pelaksana tugas dalam Binter (Pembinaan Teritorial) yang mandiri di wilayah Kota Surakarta. Pelaksanaan metode Binter Kodim 0735/Ska berupa Komsos, Wanwil dan Bakti TNI pada

umumnya berjalan baik dan dapat berpengaruh terhadap upaya untuk mengatasi terorisme di wilayah Kota Surakarta. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya penangkalan terhadap pengaruh provokasi pengaruh dan aksi radikalisme maupun terorisme. Namun penyelenggaraan metode Binter yang dilaksanakan masih belum optimal apabila dihadapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan baik dari dalam maupun dari luar.

Faktor dari dalam yaitu dari aspek personel dan sarana prasarana. Dari data aspek personel Babinsa di jajaran Kodim 0735/Ska ditinjau dari kuantitas mencapai 96 % yang berarti terdapat kelurahan yang tidak memiliki Babinsa dan dari segi kualitas kemampuan dari latar belakang pendidikan hanya 79 % yang memiliki kualifikasi bintara teritorial. Sedangkan dari aspek sarana prasarana, berupa kendaraan bermotor roda dua baru terpenuhi 44 % dan alat komunikasi HT yang nyata terdukung 88 %. Keterbatasan personel maupun sarana dan prasarana berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Metode Binter.

Faktor dari luar yaitu strata pendidikan dan jabatan, pola sikap dan pola tindak masyarakat di kota Surakarta serta perkembangan lingkungan strategis.

Masyarakat Kota Surakarta relatif sudah banyak yang berpendidikan sarjana bahkan tidak sedikit juga yang meraih gelar magister, doktoral maupun profesor. Dihadapkan dengan kondisi kualitas personel Babinsa Kodim 0735/Ska dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas ditinjau dari strata pendidikan, maka faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan metode Binter Kodim 0735/Ska.

Terorisme merupakan ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat “meledak” di Kota Solo. Kodim 0735/Ska mempunyai kendala dihadapkan dengan beban tugas yang berlebihan. Beban tugas tersebut terkait dengan padatnya kegiatan protokoler, Pam VVIP maupun keterlibatan dalam program ketahanan pangan dihadapkan pada keterbatasan personel Kodim 0735/Ska. Di sisi lain kegiatan untuk mengatasi terorisme belum ada dukungan anggaran secara spesifik.

Strategi Kodim 0735/Ska untuk mengatasi terorisme adalah dengan mengupayakan agar kelompok dan paham radikal tidak dapat berkembang. Kegiatan Binter yang dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska di fokuskan untuk meredam akar dari paham dan kelompok radikal agar tidak tumbuh. Kebijakan yang

dilaksanakan dengan mengadakan komunikasi sosial secara intensif untuk mengadakan pendekatan tokoh kelompok radikal sehingga timbul rasa segan untuk melakukan aksi radikal.

Rekomendasi

Dari hasil pemaparan penelitian di atas agar strategi Binter Kodim 0735/Ska untuk mengatasi terorisme pada masa yang akan datang dapat tercapai secara optimal maka dengan ini diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Metode Binter

Agar pelaksanaan metode Kodim 0735/Ska dapat mengatasi terorisme secara optimal maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas Babinsa melalui pembinaan peningkatan kemampuan dan pendidikan sehingga memiliki kompetensi yang dipersyaratkan bagi Personel teritorial sebagai berikut memiliki pengetahuan dan menguasai materi yang akan disampaikan dalam pelaksanaan metode Binter, menguasai teknik dalam mengoperasionalkan metode Binter, memiliki sikap, mental, perilaku dan penampilan yang dapat diterima

oleh masyarakat secara umum dan dapat meyakinkan masyarakat.

b) Perlunya pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan metode Binter di lapangan berupa kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana operasional yang dibutuhkan untuk mobilitas Babinsa di daerah binaan dan sarana komunikasi berupa HT untuk memudahkan koordinasi, penyampaian informasi, perintah dan petunjuk dalam penyelenggaraan metode Binter.

c) Perlu adanya buku petunjuk tentang pelaksanaan Binter untuk mengatasi terorisme sebagai pedoman pelaksanaan Binter untuk mengatasi terorisme bagi Satkowl.

d) Perlunya pemanfaatan teknologi dengan menggunakan internet dan media sosial dalam pelaksanaan Binter.

2. Kodim 0735/Ska

Agar Kodim 0735/Ska dapat melaksanakan Binter untuk mengatasi terorisme secara optimal maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

a) Perlunya penambahan personel untuk mengisi kekurangan personel sehingga seluruh kelurahan dapat diawasi dan dibina secara maksimal.

b) Perlunya dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan Binter untuk mengatasi terorisme.

3. Strategi

Agar pelaksanaan Strategi Binter Kodim 0735/Ska lebih efektif untuk mengatasi terorisme maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

a) Perlu adanya kebijakan untuk mengkombinasikan kegiatan Intelijen berupa penyelidikan, penggalangan dan pembinaan jaring intelijen yang dilaksanakan oleh Kodim 0735/Ska dengan kegiatan Binter untuk mengatasi terorisme untuk menyiasati tidak adanya dukungan anggaran yang khusus untuk kegiatan dalam rangka mengatasi terorisme.

b) Perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelatihan keterampilan terhadap mantan napi terorisme agar dapat memiliki mata pencaharian untuk mencegah datangnya kembali pengaruh dari kelompok radikal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan finansial.

c) Perlu adanya kebijakan untuk melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan secara masif di

lingkungan sekolah sejak dini untuk membentuk daya tangkal dan melindungi generasi muda dari pengaruh paham yang radikal dan terorisme.

- d) Perlu adanya keterpaduan metode Binter untuk mengatasi terorisme dalam pembinaan terhadap mantan napi teroris sehingga dapat merubah pola pikir yang radikal menjadi nasionalis.
- e) Perlu peningkatan koordinasi dengan Polri dalam upaya untuk mengatasi terorisme agar terjalin sinergi, keterpaduan dan kerjasama guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

- Djelantik, S., 2010, "Teroris Bukan Aktor Negara dalam Hubungan Internasional", dalam Andre Pareira (Ed) *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Parahyangan Center for Internasional Studies, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Usman (2018, 14 Mei), Pengamat UGM : Ada Ego Sektoral dalam Revisi UU Antiterorisme, Sleman: Detik.com.
- Hendropriyono, A.M., 2009, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015). Buku Putih Pertahanan Negara.
- Mabesad, 2004, *Buku Petunjuk Operasi tentang Binter*.
- Mabesad, 2011, *Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial*.
- Pela, Darwin Ahmad, 2016. *Problem Implementasi Strategi*. Jakarta, Aida Infini Maksima.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/29-02/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Buku Petunjuk Teknik Pembinaan Perlawanan Wilayah.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/37-02/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Buku Petunjuk Teknik Komunikasi Sosial
- Samodro, Dewanto (2017, 20 Februari), Indonesia satu satunya negara Tanpa UU Keamanan Nasional, Jakarta : Antaranews.com.
- Sedarmayanti, 2014. *Manajemen Strategi*, Bandung, Refika Aditama.
- Setara, 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta*, Pustaka Masyarakat Setara. Jakarta.
- Supriyatno, Makmur, 2017. *Tentang Perang Bagian I Terjemahan " On War" Carl Von Clausewitz*. Jakarta, Makmur Cahaya Ilmu, 2017.
- UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.